

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berkelanjutan dan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa di Merauke untuk Mendukung SDGs

Simon Yanuarius Konorop¹; Willem Kabuam²; Yulianus Tuakra³

^{1,2,3} STISIPOL Yaleka Maro Merauke



Email Korespodensi: simonyanuariuskonorop@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 01-01-2026

Disetujui 15-01-2026

Diterbitkan 30-01-2026

Katakunci:

Pemberdayaan Masyarakat; Pelayanan Publik Desa; Administrasi Desa; Partisipasi Masyarakat; Sustainable Development Goals (SDGs)

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat Desa Tanah Miring, Merauke dalam mengakses, mengelola, dan mengawasi pelayanan administrasi desa secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait layanan publik, sehingga tercipta sistem administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan pengabdian menggunakan metode partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tahapan meliputi identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan langsung, dan evaluasi berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner singkat untuk menilai pemahaman, keterampilan, dan kepuasan masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi desa, hak dan kewajiban warga, serta partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi layanan publik. Kapasitas aparat desa juga meningkat melalui pendampingan, sehingga kolaborasi antara aparat dan masyarakat lebih responsif dan akuntabel. Prosedur administrasi desa menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dan pendampingan aparat secara simultan mampu menciptakan pelayanan administrasi desa yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan lokal inklusif serta pencapaian SDGs di tingkat desa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Konorop, S. Y., Kabuam, W. ., & Tuakra, Y. . (2026). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berkelanjutan dan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa di Merauke untuk Mendukung SDGs. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 316-326. <https://doi.org/10.63822/vwtn5r19>

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Ugwu et al. 2025). Layanan administrasi desa yang efektif tidak hanya memastikan terpenuhinya hak masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan (Tambaip and Tjilen 2023). Standar pelayanan publik yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023). Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa menjadi sangat krusial, mengingat desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di Tanah Miring, Merauke, pelayanan administrasi desa masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan pemahaman tentang prosedur administrasi publik. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan layanan desa juga relatif rendah. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan publik masih minim, sehingga menyebabkan keterbatasan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan kualitas layanan (Tambaip et al. 2024).

Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas administrasi desa di Tanah Miring. Proses pelayanan yang kurang optimal sering menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan dokumen, minimnya transparansi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik. Dampak jangka panjangnya dapat menghambat pembangunan lokal, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mengurangi potensi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pelayanan publik yang ideal dengan realitas di lapangan. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa dan keberlanjutan pelayanan publik (Tambaip, Tjilen, Moento, et al. 2023). Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan layanan administrasi, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya memperkuat partisipasi lokal, tetapi juga membantu pemerintah desa dalam menciptakan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian SDGs. Intervensi semacam ini menjadi landasan ilmiah bagi kegiatan pengabdian masyarakat di Tanah Miring, Merauke.

Meskipun pelayanan publik desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan lokal dan pencapaian SDGs, di Tanah Miring, Merauke terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas administrasi desa. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik di pihak aparat desa maupun masyarakat. Aparat desa sering mengalami keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam prosedur administrasi serta manajemen pelayanan publik, sementara masyarakat cenderung memiliki pemahaman yang rendah tentang hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan layanan desa. Kondisi ini menyebabkan layanan administrasi menjadi kurang efisien, prosedur lambat, dan minimnya transparansi dalam penyampaian informasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan evaluasi pelayanan publik masih relatif rendah. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan mengakibatkan terbatasnya umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan kualitas administrasi desa. Akibatnya, potensi pemberdayaan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pembangunan lokal belum tergalikan secara optimal. Permasalahan ini tidak hanya memengaruhi kualitas pelayanan administrasi, tetapi juga berdampak pada rendahnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan lambatnya pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Tanah Miring.

Meskipun sejumlah program pengabdian masyarakat dan pembangunan desa telah dilaksanakan di Merauke, khususnya dalam konteks administrasi dan pelayanan publik, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Program yang ada cenderung fokus pada penyediaan layanan administratif secara prosedural tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan, evaluasi, dan perbaikan layanan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kualitas pelayanan publik masih sangat terbatas, sehingga efektivitas dan keberlanjutan pelayanan publik belum optimal. Kesenjangan lain terlihat pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang masih sporadis dan tidak terstruktur. Banyak kegiatan pengabdian yang hanya bersifat sosialisasi atau pelatihan sekali waktu, sehingga masyarakat belum mampu menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan untuk secara mandiri mengakses dan mengawasi layanan administrasi desa. Hal ini menyebabkan potensi pemberdayaan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik berkelanjutan belum termanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat yang dirancang dengan pendekatan partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis kapasitas lokal sangat diperlukan untuk menutup kesenjangan ini.

Urgensi pengabdian masyarakat ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan administrasi desa di Tanah Miring, Merauke. Keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban administratif, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan layanan publik berpotensi menghambat efektivitas pembangunan lokal dan pencapaian SDGs di tingkat desa. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi kunci karena dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan administrasi desa, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, pengabdian ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Keterbaruan pengabdian ini terletak pada pendekatan partisipatif dan berbasis kapasitas lokal yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kualitas administrasi desa. Berbeda dengan program pengabdian sebelumnya yang bersifat sporadis atau hanya fokus pada sosialisasi prosedural, kegiatan ini mengintegrasikan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah desa. Pendekatan ini tidak hanya menekankan peningkatan keterampilan administratif, tetapi juga pembangunan kesadaran hukum, kemampuan pengawasan, dan tanggung jawab kolektif masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini menghadirkan model baru yang dapat diterapkan sebagai best practice untuk pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik berkelanjutan di konteks desa di Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat Tanah Miring, Merauke dalam mengakses, mengelola, dan mengawasi pelayanan administrasi desa secara efektif dan berkelanjutan. Pengabdian ini juga bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait layanan publik, sehingga tercipta sistem administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode partisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan menekankan keterlibatan aktif warga dalam seluruh proses kegiatan. Fokus utama pendekatan ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengelola layanan administrasi desa, menumbuhkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban warga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang dipilih berdasarkan kondisi aktual pelayanan administrasi desa dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tahun 2025 selama tiga bulan, mulai dari Februari hingga April, dengan pendekatan sesi pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Penjadwalan ini mempertimbangkan ketersediaan aparat desa dan masyarakat, sehingga memungkinkan keterlibatan aktif warga secara konsisten dalam seluruh tahapan pengabdian, mulai dari identifikasi kebutuhan, praktik pengelolaan administrasi, hingga evaluasi dan umpan balik.

Sasaran utama pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat desa, aparat desa, dan tokoh masyarakat, yang berperan sebagai agen strategis dalam mendorong partisipasi aktif dan keberlanjutan pelayanan administrasi desa. Secara khusus, kegiatan difokuskan pada kelompok warga yang sering menggunakan layanan administrasi, seperti pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, dan izin usaha, agar mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur, hak, dan kewajiban terkait layanan desa. Keterlibatan sasaran ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat peran masyarakat secara kolektif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik, sehingga tercipta administrasi desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat, yang dilakukan melalui survei awal, wawancara, dan observasi langsung di Desa Tanah Miring. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kendala yang dihadapi masyarakat dan aparat desa dalam pelayanan administrasi, termasuk hambatan dalam pengurusan dokumen, akses informasi, serta keterbatasan kapasitas SDM. Hasil identifikasi kebutuhan ini menjadi dasar dalam merancang program sosialisasi dan pelatihan yang relevan, sehingga materi yang diberikan tepat sasaran dan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi desa, hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme pengaduan atau pengawasan terhadap layanan publik.

Tahap berikutnya adalah pendampingan langsung di mana masyarakat dibimbing untuk mempraktikkan pengelolaan administrasi dan pemanfaatan layanan publik secara efektif. Pendampingan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan aparat desa sebagai fasilitator, sehingga terjadi transfer pengetahuan yang nyata dan berkesinambungan. Selanjutnya, dilakukan tahap evaluasi dan umpan balik, yaitu pengumpulan masukan dari masyarakat dan aparat desa mengenai efektivitas kegiatan pengabdian. Umpan balik ini digunakan untuk menyesuaikan metode, meningkatkan kualitas program, serta memastikan keberlanjutan pelayanan administrasi desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam pengabdian masyarakat ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa instrumen untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan representatif. Observasi langsung dilakukan di kantor desa dan selama kegiatan masyarakat untuk melihat secara nyata proses pelayanan administrasi, interaksi antara aparat desa dan warga, serta hambatan yang muncul dalam praktik sehari-hari. Selain itu, wawancara mendalam dengan aparat desa dan warga dilaksanakan untuk memperoleh perspektif mereka terkait kendala, kebutuhan, dan harapan terhadap layanan publik. Untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai pemahaman dan kepuasan masyarakat, digunakan kuesioner singkat yang disebarkan kepada warga yang aktif menggunakan layanan administrasi desa.

Indikator keberhasilan pengabdian ditetapkan berdasarkan perubahan nyata dalam kapasitas, partisipasi, dan kualitas layanan. Pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan administrasi desa menjadi ukuran utama efektivitas program. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan publik menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif. Ketiga, tercapainya sistem administrasi desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan menjadi indikator penting bahwa pengabdian berhasil mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memaparkan hasil pengabdian, penting untuk menekankan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Tanah Miring, Merauke, dalam mengakses dan mengelola pelayanan administrasi desa. Pengabdian ini mengintegrasikan pendekatan partisipatif, pelatihan, dan pendampingan langsung, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini melibatkan aparat desa sebagai mitra strategis, untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat berjalan seiring dengan perbaikan sistem administrasi desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan kerangka ini, hasil pengabdian diharapkan mencerminkan dampak nyata terhadap kualitas layanan publik dan partisipasi aktif masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Administrasi Desa di Tanah Miring, Merauke

Indikator Pemahaman Masyarakat	Sebelum Pengabdian (%)	Sesudah Pengabdian (%)	Peningkatan (%)	Interpretasi Hasil
Prosedur pengurusan KTP	40	85	+45	Masyarakat lebih memahami tahapan pengurusan KTP
Prosedur pengurusan KK	45	88	+43	Kesadaran masyarakat meningkat signifikan
Prosedur akta kelahiran	35	80	+45	Warga lebih proaktif dalam mengurus akta kelahiran

Prosedur izin usaha	30	75	+45	Pemahaman prosedur izin usaha meningkat
Kesadaran hak & kewajiban administratif	25	82	+57	Partisipasi masyarakat dalam layanan publik lebih tinggi

Hasil pengabdian pada tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman masyarakat Tanah Miring, Merauke terhadap prosedur administrasi desa. Sebelum kegiatan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, izin usaha, serta kesadaran hak dan kewajiban administratif masih relatif rendah (25–45%). Setelah pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, tingkat pemahaman meningkat drastis menjadi 75–88%, dengan peningkatan tertinggi pada kesadaran hak dan kewajiban administratif sebesar 57%. Hal ini menandakan bahwa pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat efektif dalam mendorong warga lebih proaktif dalam mengakses dan mengelola layanan publik desa secara mandiri.

Tabel 2. Hasil Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat di Tanah Miring Merauke

Aktivitas Partisipasi Masyarakat	Jumlah Peserta	Bentuk Capaian	Keterlibatan / Dampak terhadap Layanan Desa
Diskusi perencanaan layanan desa	20 orang	Memberikan masukan terkait prosedur administrasi dan prioritas layanan	Rencana layanan desa lebih sesuai kebutuhan masyarakat
Evaluasi layanan administrasi	18 orang	Mengisi lembar evaluasi dan memberikan saran perbaikan	Transparansi dan akuntabilitas meningkat
Pengawasan layanan administrasi	12 orang	Memantau proses pengurusan dokumen di kantor desa	Kesalahan dan keterlambatan berkurang
Pembentukan kelompok agen pemantau	12 orang	Menjadi tim rutin yang memonitor kualitas pelayanan desa	Partisipasi masyarakat berkelanjutan, mendukung perbaikan jangka panjang

Hasil pengabdian pada tabel 2 menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat Tanah Miring dalam berbagai aspek layanan administrasi desa. Warga terlibat aktif dalam diskusi perencanaan layanan, evaluasi administrasi, dan pengawasan proses pengurusan dokumen, serta membentuk kelompok agen pemantau kualitas layanan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan desa, tetapi juga memastikan layanan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi berkelanjutan yang mendukung keberlanjutan pelayanan publik.

Tabel 3. Hasil Pengabdian Masyarakat di Desa Tanah Miring Merauke

Aspek Pengabdian	Indikator Keberhasilan	Hasil Pengabdian / Temuan
Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	Keterampilan administrasi, komunikasi, dan pelayanan publik	Aparat desa mampu mengelola dokumen lebih cepat, memberikan informasi jelas, dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.

	Kolaborasi masyarakat	dengan	Terbentuk komunikasi rutin antara aparat dan warga; warga dilibatkan dalam evaluasi layanan dan pengambilan keputusan administratif.
Perbaikan Sistem Administrasi Desa	Struktur dan administrasi	prosedur	Prosedur administrasi menjadi lebih terstandar, jelas, dan mudah diakses warga.
	Transparansi akuntabilitas layanan	dan	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan meningkat; laporan dan pengaduan warga tercatat dan ditindaklanjuti secara rutin.

Hasil pengabdian masyarakat di Desa Tanah Miring pada tebl 3 menunjukkan adanya peningkatan signifikan baik pada kapasitas aparat desa maupun sistem administrasi desa. Aparat desa memperoleh pendampingan yang meningkatkan keterampilan administrasi, komunikasi, dan pelayanan publik, sehingga proses pengelolaan dokumen menjadi lebih cepat, informasi yang diberikan lebih jelas, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara aparat dan warga meningkat, tercermin dari partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan dan pengambilan keputusan administratif. Pada aspek sistem administrasi desa, prosedur layanan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses oleh warga. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan rutin juga meningkat, dengan laporan dan pengaduan warga tercatat serta ditindaklanjuti secara lebih akuntabel. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan pendampingan aparat secara simultan dapat menciptakan pelayanan administrasi desa yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan.

Pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat terbukti meningkatkan pemahaman warga Tanah Miring terkait prosedur administrasi desa. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat diberikan penjelasan langkah-langkah pengurusan dokumen seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan izin usaha. Materi disampaikan secara langsung dan interaktif, disertai simulasi praktik sehingga warga tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat mempraktekkan proses administrasi secara nyata. Pendekatan ini memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur yang sebelumnya dianggap rumit atau membingungkan. Peningkatan pemahaman masyarakat juga tercermin dari kemampuan mereka dalam mengenali hak dan kewajiban administratif (Ali et al. 2024). Sebelum pengabdian, banyak warga kurang menyadari mekanisme pelayanan publik dan prosedur pengajuan dokumen, sehingga sering terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pengurusan administrasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa warga yang mengikuti pelatihan mampu menjelaskan langkah-langkah administratif dengan benar dan lebih percaya diri dalam mengakses layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pengabdian secara langsung berkontribusi pada peningkatan literasi administratif masyarakat (Muktar 2026).

Peningkatan pengetahuan ini berkorelasi positif dengan kesadaran warga dalam memanfaatkan layanan publik secara proaktif. Warga yang memahami prosedur administrasi desa cenderung lebih cepat dan tepat dalam mengurus dokumen, serta mulai menunjukkan inisiatif untuk menanyakan informasi tambahan, memberikan masukan, dan melaporkan kendala pelayanan. Partisipasi aktif ini menandai pergeseran dari peran masyarakat sebagai penerima pasif layanan menjadi mitra strategis pemerintah desa, yang mampu turut mengawasi dan memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga (Buulolo, Pardede, and Laia 2024). Selain itu, penguatan pemahaman ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan pelayanan publik. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya menjadi agen perubahan yang dapat

mendorong perbaikan administrasi desa secara berkelanjutan (Desembrianita et al. 2026). Keikutsertaan warga dalam pengawasan rutin dan evaluasi pelayanan memungkinkan adanya feedback yang konstruktif bagi aparat desa, sehingga prosedur administrasi dapat terus diperbaiki. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat tata kelola desa dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga Tanah Miring dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan administrasi desa mengalami peningkatan signifikan. Melalui sesi diskusi, lokakarya, dan pendampingan langsung, masyarakat diajak untuk memberikan masukan terkait prosedur administrasi, kebutuhan dokumen, serta kendala yang mereka hadapi dalam mengakses layanan publik. Keterlibatan ini membantu aparat desa memahami perspektif warga, sehingga perencanaan layanan menjadi lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Djafar and Akibu 2025). Selain itu, pengawasan oleh masyarakat memberikan dampak nyata terhadap akuntabilitas pelayanan publik. Warga yang terlibat aktif dalam memantau proses administrasi mampu mendeteksi kesalahan, kelalaian, atau keterlambatan dalam pengurusan dokumen. Kehadiran masyarakat sebagai pengawas internal ini mendorong aparat desa untuk lebih transparan dalam menjalankan prosedur, melaporkan perkembangan layanan, dan menindaklanjuti keluhan dengan cepat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi bentuk keterlibatan simbolis, tetapi juga memperkuat mekanisme kontrol sosial yang meningkatkan kualitas layanan.

Evaluasi partisipasi masyarakat juga menunjukkan adanya peningkatan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap pelayanan publik. Warga yang merasa dilibatkan secara aktif cenderung lebih peduli terhadap kualitas administrasi desa dan berinisiatif untuk membantu tetangganya memahami prosedur layanan. Hal ini menandai pergeseran budaya administratif di tingkat desa, dari sistem yang sepenuhnya birokratis menjadi sistem kolaboratif, di mana warga berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa. Dampak jangka panjang dari partisipasi aktif ini terlihat pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sistem administrasi desa (Tjilen et al. 2025). Proses pelayanan yang sebelumnya tertutup kini menjadi lebih terbuka, warga dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, dan aparat desa terdorong untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah administrasi. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi rutin juga memberikan feedback yang konstruktif, memungkinkan perbaikan prosedur dan penguatan tata kelola desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pelayanan publik yang selaras dengan prinsip SDGs (Amruddin et al. 2024).

Pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat terbukti memberikan perubahan positif terhadap keterampilan dan kompetensi aparat desa di Tanah Miring. Melalui pelatihan langsung, lokakarya, dan sesi konsultasi, aparat desa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur administrasi, manajemen dokumen, serta mekanisme pelayanan publik yang transparan dan akuntabel (Saragih et al. 2023). Pendekatan ini menekankan praktik langsung sehingga aparat desa tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga mampu menerapkan prosedur secara efisien dan tepat waktu. Peningkatan kapasitas aparat desa juga tercermin dari kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih efektif. Aparat desa mulai terbiasa memberikan penjelasan prosedur layanan yang lebih jelas, mendengarkan keluhan warga, dan menanggapi pertanyaan secara profesional (Saragih et al. 2023). Hal ini berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi

desa, serta memperkuat hubungan antara warga dan pemerintah desa sebagai mitra kolaboratif dalam pembangunan lokal.

Hubungan antara peningkatan kapasitas aparat desa dan efektivitas administrasi desa sangat terlihat dalam kualitas layanan yang dihasilkan. Aparat desa yang kompeten mampu mengelola dokumen dengan lebih terstruktur, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan kesalahan atau keterlambatan. Kemampuan ini secara langsung meningkatkan efisiensi operasional desa dan menurunkan tingkat keluhan masyarakat terkait layanan publik. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparat desa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan administrasi desa yang efektif dan berkualitas. Lebih lanjut, peningkatan kompetensi aparat desa berkontribusi pada keberlanjutan sistem administrasi desa. Aparat yang terlatih dan memahami prosedur secara menyeluruh mampu mempertahankan standar pelayanan yang baik, sekaligus memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi layanan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparat desa tidak hanya berdampak pada kualitas administratif jangka pendek, tetapi juga mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal (Fallah Shayan et al. 2022).

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa prosedur administrasi desa di Tanah Miring menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pendampingan dan lokakarya, aparat desa menata ulang alur pelayanan dokumen, menyederhanakan persyaratan yang rumit, dan menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur administrasi. Perubahan ini memudahkan warga dalam mengakses layanan, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan kesalahan administrasi. Dengan prosedur yang lebih sistematis, pelayanan administrasi desa menjadi lebih efisien dan akuntabel. Integrasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan administrasi berdampak signifikan terhadap keberlanjutan sistem administrasi desa (Mayora et al. 2025). Keterlibatan aktif warga tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan mekanisme feedback yang berkelanjutan. Masyarakat yang merasa memiliki peran dalam tata kelola desa cenderung lebih peduli terhadap kualitas layanan dan berinisiatif melaporkan kendala atau memberikan saran perbaikan. Hal ini menandai adanya kolaborasi yang efektif antara aparat desa dan masyarakat, yang memperkuat sistem administrasi secara jangka panjang.

Dari perspektif pembangunan lokal, peningkatan kualitas administrasi desa dan partisipasi masyarakat berkontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Layanan publik yang lebih transparan dan partisipatif mendukung pembangunan inklusif, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih mudah terhadap dokumen penting dan layanan administratif. Keterlibatan warga sebagai mitra strategis pemerintah desa memastikan bahwa pembangunan lokal berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat. Selain itu, model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat dianggap sebagai praktik terbaik (best practice) yang potensial untuk direplikasi di desa lain. Pendekatan yang menggabungkan pelatihan, pendampingan langsung, dan keterlibatan aktif warga membangun kapasitas masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi desa. Model ini menekankan kolaborasi, keberlanjutan, dan penguatan tata kelola desa melalui partisipasi masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi bagi program pengabdian masyarakat di wilayah lain dengan konteks serupa. Pengabdian masyarakat di Tanah Miring tidak hanya memberikan dampak langsung pada kualitas administrasi dan kapasitas warga, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan

prinsip-prinsip SDGs, membangun sistem administrasi desa yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pembangunan lokal secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Tanah Miring, Merauke berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi desa serta hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan layanan publik. Pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang diberikan mampu menumbuhkan kesadaran dan keterampilan warga, sehingga partisipasi mereka dalam perencanaan, evaluasi, dan pengawasan pelayanan administrasi desa meningkat secara signifikan. Hal ini turut memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan layanan publik di tingkat desa. Selain itu, pendampingan terhadap aparat desa juga meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengelola administrasi publik secara efektif. Kolaborasi yang terbentuk antara masyarakat dan pemerintah desa menciptakan sistem administrasi yang lebih terstruktur, responsif, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan pembangunan lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh, Raditya Pratama, Rizky Perdana BP, Nina Lestari, Akhmal Duta Bagaskara, and Muhammad Husni Mubarak. 2024. "Peningkatan Literasi Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Sumberpetung Lumajang Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Pelayanan Publik." *NUMBAY: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1):52–59.
- Amruddin, Amruddin, Fransiska Ekobelawati, Iwan Henri Kusnadi, Imron Natsir, and Sri Chatun. 2024. "Socialization of the Village SDGs Program in Realizing Villages Without Hunger and Poverty." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4(3):206–12.
- Buulolo, Atuloli, Piki Darma Kristian Pardede, and Safarius Laia. 2024. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Hilizalootano Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan." *Jurnal Governance Opinion* 9(1):46–60.
- Desembrianita, Eva, Khanan Yusuf, Salmah Harun, Dessy Evianti, and Moh Zaini. 2026. "Sinergi Dosen Dan Aparat Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Desa: Pengabdian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4(3):20013–23.
- Djafar, Franky, and Rifka S. Akibu. 2025. "Perencanaan Pembangunan Dan Pelayanan Desa Melalui Penguatan Kapasitas Digital Aparatur Di Desa Wubudu Kabupaten Gorontalo Utara." *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 6(3):132–42.
- Fallah Shayan, Niloufar, Nasrin Mohabbati-Kalejahi, Sepideh Alavi, and Mohammad Ali Zahed. 2022. "Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for Corporate Social Responsibility (CSR)." *Sustainability* 14(3):1222.
- Mayora, Mayora, Ahmad Suja'i Tanjung, Anita Khairani Siregar, Rehulina Rehulina, Arini Alfa Hidayah, and Rofiil Harahap. 2025. "Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa Untuk Mendorong Perekonomian Di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa." *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 3(1):177–85.
- Muktar, Lalu. 2026. "Literasi Digital Fungsional Berbasis Praktik Untuk Meningkatkan Kemandirian Akses Layanan Publik Digital Masyarakat Desa." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*

- Teknologi Tepat Guna* 2(1):37–47.
- Saragih, Jopinus, Melisa Nur Asima Sidabutar, Jubelando O. Tambunan, Salim Efendi, and Adrian K. Tarigan. 2023. “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kabupaten Simalungun.” *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2(2):73–85.
- Tambaip, Beatus, Pulung Riyanto, Alexander Phuk Tjilen, Ilmu Administrasi Negara, and Universitas Musamus. 2024. “Penguatan Sistem Manajemen SDM Untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan Di Lingkungan Desa.” 1(10):1611–19.
- Tambaip, Beatus, and Alexander Phuk Tjilen. 2023. “Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan Di Papua.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14(1):101–10.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, Paul Adryani Moento, and Pulung Riyanto. 2023. “MENUJU DESA MANDIRI: MEWUJUDKAN POTENSI KAMPUNG MELALUI PEMBENTUKAN BUMK.” *Nusantara Hasana Journal* 2(12):98–106.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. “Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik.” *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 5(1):1–9.
- Tjilen, Alexander Phuk, August Ernst Pattiselano, Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Diana Sri Susanti, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Beatus Tambaip, Samel Watina Ririhena, and Pulung Riyanto. 2025. “Evaluating Cultural, Historical, and Socio-Economic Dynamics in the Palm Oil System: An Implementation of Sustainable Governance.” *Journal of Governance and Regulation/Volume* 14(1).
- Ugwu, Chinyere N., Okechukwu Paul-Chima Ugwu, Esther Ugo Alum, Val Hyginus Udoka Eze, Mariam Basajja, Jovita Nnenna Ugwu, Fabian C. Ogenyi, Regina Idu Ejemot-Nwadiaro, Michael Ben Okon, and Simeon Ikechukwu Egba. 2025. “Sustainable Development Goals (SDGs) and Resilient Healthcare Systems: Addressing Medicine and Public Health Challenges in Conflict Zones.” *Medicine* 104(7):e41535.